

SKRIPSI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI
LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BINTAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1(S1)
Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Riau



DI SUSUN OLEH :
MUHAMMAD TAUFIK HARFAD
125310526

AKUNTANSI – S1
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2018



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674681 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru-28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMAD TAUFIK HARFAD
NPM : 125310526
JURUSAN : AKUNTANSI-SI
FAKULTAS : EKONOMI
JUDUL : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS
INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BINTAN

Disahkan Oleh :

PEMBIMBING I

Dr. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA

PEMBIMBING II

Burhanuddin, SE., M.Si

Mengetahui :

DEKAN

Drs. H. Abrar, M.Si., Ak., CA

KETUA PRODI AKUNTANSI SI

Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si. Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674681 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru-28284

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMAD TAUFIK HARFAD
NPM : 125310526
JURUSAN : AKUNTANSI-SI
FAKULTAS : EKONOMI
JUDUL : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS
INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BINTAN

Disetujui Oleh :

Tim Penguji

1. Siska, SE, MSi, Ak., CA
2. Alfurkaniati, SE, MSi, Ak., CA
3. Dr. Kasman Arifin, SE, MM, Ak

()
()
()

PEMBIMBING I



Dr. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA

PEMBIMBING II



Burhanuddin, SE., M.Si

Mengetahui :

KETUA PRODI AKUNTANSI SI



Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si, Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp.(0761) 674681 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru-28284

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

NAMA : Muhamad Taufik Harfiad Harahap

NPM : 125310526

PRODI : Akuntansi

FAKULTAS : Ekonomi

SPONSOR : Dr. Zulhelmy, SE, MSi, Ak, CA

CO SPONSOR : Burhanuddin, SE, M.Si

JUDUL SKRIPSI : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan

Dengan Rincian Sebagai Berikut:

Tanggal	Catatan		Berita Acara	Paraf	
	Sponsor	Co Sponsor		Sponsor	Co sponsor
07-11-2016	x		- Sesuaikan dengan Peraturan terbaru - Alasan Penulisan		
07-12-2016	x		- Masalah atau Fenomena belum ada - Kuisisioner Dilampirkan		
14-02-2017	x		- LBM, Populasi, Sampel		
28-02-2017	x		- Tabel : Sistem Pengendalian Intern, Kapasitas sumber daya		

			manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi		
20-03-2017	x		- Referensi Kasus Sesuai Teori		
20-03-2017	x		- Teruskan ke Pembimbing II		
		x	- Penulisan LBM		
		x	- Catatan Kaki atau Bodynote		
		x	- Lihat Sampel		
		x	- Lanjut ke PB 1		
28-09-2017	x		- ACC Seminar		
		x	- ACC PB II		
30-11-2018	x		- Perbaiki Bab V		
	x		- Bab VI		
	x		- Abstrak		
	x		- Ke PB II		
		x	- Kesimpulan, Lanjut ke PB1		
01-03-2019	x		- ACC		
		x	- ACC		

Pekanbaru, 18 April 2019
Wakil Dekan I



Dr. Firdaus AR, SE, M Si, Ak, CA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau No:1996/Kpts/FE-UIR/2019, Tanggal 10 April 2019, Maka pada Hari Kamis 11 April 2019 di laksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2018/2019.

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama | : Muhammad Taufik Harfad |
| 2. N P M | : 125310526 |
| 3. Program Studi | : Akuntansi S1 |
| 4. Judul skripsi | : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan |
| 5. Tanggal ujian | : 11 April 2019 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang sidang meja hijau Fekon UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : <i>Lulus / (af)</i> |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN

Ketua


Dr. Firdaus AR, SE, M, SLAk, CA
Wakil Dekan Bid. Akademis

Sekretaris

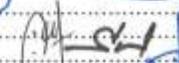

Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si, CA
Ketua Prodi Akt S1

Dosen penguji :

1. Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA.
2. Burhanuddin, SE., M.Si.
3. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA.
4. Siska, SE., M.Si., Ak., CA.
5. Dr. Kasman Arifin ZA, SE., MM., Ak.

Saksi

1. Yolanda Pratami, SE., M.Ak.


.....

.....

.....

.....

.....

Pekanbaru, 11 April 2019

Mengetahui
Dekan,


Drs. H. Abrar, M.Si, Ak, CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 1996/Kpts/FE-UIR/2019
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dilaksanakan ujian skripsi/oral komprehensiv sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
d. Nomor : 001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

N a m a : Muhammad Taufik Harfad
N P M : 125310526
Jurusan/Jenjang Pendid : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan

2. Penguji ujian skripsi/oral komprehensiv mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dr. Zulhelmy, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor Kepala, D/a	Materi	Ketua
2	Burhanuddin, SE., M.Si	Lektor, C/e	Sistematika	Sekretaris
3	Alfurkaniati, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor, C/c	Methodologi	Anggota
4	Siska, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor, C/c	Penyajian	Anggota
5	Dr. Kasman Arifin, MM	Lektor Kepala	Bahasa	Anggota
6	Yolanda Pratami, SE., M.Ak	-	-	Saksi I
7				Saksi II
8				Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 April 2019
Dekan,

Drs. Abrar., M.Si, Ak., CA

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Taufik Harfad
NPM : 125310526
Program Studi : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan
Hari/Tanggal : Kamis / 11 April 2019
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si,Ak,CA		
2	Burhanuddin, SE., M.Si		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA.		
2	Siska, SE., M.Si., Ak., CA.		
3	Dr. Kasman Arifin ZA, SE., MM.,Ak.		

Hasil Seminar : *)

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Lulus | (Total Nilai _____) |
| ② Lulus dengan perbaikan | (Total Nilai <u>63,5</u>) |
| 3. Tidak Lulus | (Total Nilai _____) |

Mengetahui
An.Dekan


Dr.Firdaus AR,SE,M.Si,Ak,CA
Wakil Dekan I

Pekanbaru, 11 April 2019
Ketua Prodi


Dra.Eny Wahyuningsih,M.Si,CA

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

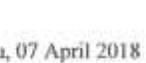
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Muhammad Taufik Harfad Harahap
NPM : 125310526
Judul Proposal : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan
Pembimbing : 1. Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA
2. Burhanuddin, SE., M.Si
Hari/Tanggal Seminar : Sabtu 07 April 2018

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dr.H.Zulhelmy, SE., M.Si.,Ak,CA		1. 
2.	Burhanuddin, SE., M.Si		2. 
3.	Dra.Eny Wahyuningsih,M.Si.CA		3. 
4.	Raja Ade Fitrasari M, SE., M.Acc		4. 
5.	Yusrwati, SE., M.Si		5. 
6.			6. 

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An.Dekan Bidang Akademis


Dr.Firdaus AR,SE,M.Si,Ak.CA

Pekanbaru, 07 April 2018
Sekretaris,


Dra.Eny Wahyuningsih,M.Si.CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 1064/Kpts/FE-UIR/2016
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
Bismillahirrohmanirrohim
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Surat penetapan Ketua Jurusan/Program Studi Akuntansi tanggal 6 Oktober 2016 tentang penunjukan Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa.
 2. Bahwa dalam membantu mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepeutuhnya terhadap Mahasiswa tersebut

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
 2. Undang-Undang RI Nomor:14 Tahun 2005
 3. Undang-Undang RI Nomor:12 Tahun 2012
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 Tahun 2014
 5. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
 a. Nomor : 192/SK/BAN-PT/AK.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
 b. Nomor : 197/SK/BAN-PT/AK.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Manajemen
 c. Nomor : 197/SK/BAN-PT/AK.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Akuntansi S1
 d. Nomor : 001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi
 6. Surat Keputusan YLPI Daerah Riau
 a. Nomor: 66/Skep/YLPI/II/1987
 b. Nomor: 10/Skep/YLPI/IV/1987
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 8. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Riau tanggal 10 Maret 1987
 a. Nomor: 510/A-UJR/4-1987

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Mengangkat Saudara-saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu:

No	N a m a	Jabatan/Golongan	Keterangan
1.	Dr. Zulhelmy, SE., M.Si, Ak, CA	Lektor Kepala, D/a	Pembimbing I
2	Burhanuddin, SE., M.Si	Lektor, C/c	Pembimbing II

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah:

N a m a : Muhammad Taufik Harfad Harahap
 N P M : 125310526
 Jurusan/Jenjang Pended : Akuntansi / S1
 Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang.

3. Tugas pembimbing adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 52/UJR/Kpts/1989 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya memperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal
 5. Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segera akan ditinjau kembali.
 Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan menurut semestinya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
 Pada Tanggal: 17 Oktober 2016
 Dekan

Dr. Abrar, M.Si, Ak, CA

Tembusan : Disampaikan pada:
 1. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau
 2. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana, baik di Universitas Islam Riau maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah dengan disebutkan nama pengarah dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Pekanbaru, 28 Januari 2019

Saya yang membuat pernyataan



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI
LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BINTAN**

Oleh:

MUHAMMAD TAUFIK HARFAD
125310526

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten bintan

Populasi dalam penelitian ini adalah 37 SKPD pada pemerintah daerah kabupaten bintan dan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Kepala SKPD, Kepala Bagian Keuangan, dan Kepala Bagian Perencanaan Program. sehingga tiap SKPD ditetapkan sebanyak 3 orang yang menjadi responden. Dalam penelitian ini kuesioner disebarakan sebanyak 84 buah kuesioner pada 28 instansi/dinas di Kabupaten Bintan. Penentuan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan software SPSS 23.

Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa (1) Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bintan, (2) Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bintan, (3) Pemanfaatan Teknologi berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bintan. Sedangkan Secara Simultan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bintan.

Kata Kunci : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

**FACTORS THAT INFLUENCE THE QUALITY OF FINANCIAL
STATEMENT INFORMATION IN THE BINTAN DISTRICT REGIONAL
GOVERNMENT**

OLEH:

**MUHAMMAD TAUFIK HARFAD
125310526**

ABSTRACT

This study aims to examine the factors that influence the quality of financial statement information in the regional government of Bintan Regency

The population in this study was 37 SKPD in the regional government of Bintan Regency and the respondents in this study were the Head of SKPD, Head of Finance, and Head of Program Planning Section. so that each SKPD is determined by 3 people who become respondents. In this study 84 questionnaires were distributed to 28 agencies / agencies in Bintan Regency. Determination of samples using purposive sampling method. This study uses a multiple linear regression analysis model with SPSS 23 software.

The results of this study partially indicate that (1) Capacity of Human Resources influences the Quality of Information on Local Government Financial Statements in Bintan Regency, (2) Internal Control System influences the Quality of Information on Local Government Financial Statements in Bintan Regency, (3) Use of influential Technology positive effect on the Quality of Information on Local Government Financial Statements in Bintan Regency While Simultaneously the Capacity of Human Resources, the Internal Control and Technology Utilization System has a significant positive effect on the Quality of Information on Local Government Financial Statements in Bintan Regency.

Keywords: Factors Affecting the Quality of Information on Local Government Financial Statements

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT senantiasa kita ucapkan, atas limpahan rahmat dan karunia serta nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan”**, Sholawat dan salam tak lupa pula disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu teguh hatinya di jalan Allah.

Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus ikhlas penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL. selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Wakil Rektor I, II, III Universitas Islam Riau.
3. Bapak Drs. H. Abrar, M.Si.,Ak.,CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
4. Bapak Wakil Dekan I, II, III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
5. Ibu Eny Wahyuningsih, SE.,M.Si., Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. Zulhelmy, SE, M.Si,Ak,CA selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Burhanuddin, SE, M,Si selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.

8. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Akuntansi dan Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah banyak membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
9. Bapak Kepala Tata Usaha dan Bapak/Ibu Karyawan/Karyawati Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
10. Bapak dan ibu pimpinan beserta staf skpd di kabupaten Bintan yang telah membantu penulis dalam memberikan data yang digunakan dalam skripsi ini.
11. Untuk kedua orang tua saya tercinta Ayahku Rahmad D.K.Harahap (Alm) dan Ibuku Ifa Kurniati atas jasa-jasanya, kesabaran, do'a, dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis.
12. Buat adik-adikku Dinda Novianti, dan Mitha Syaharani dan Yulia Triana Putri yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
13. Buat Nenek Mariama Sembay, Atuk Prof.Dr.Amir Hasan MS,SE,MM,CPA,CA, ayah Dr. Ir Saipul Bahri Mec dan ibu Dewi Syintiarani, Pakde Mahmud dan Bukde Samsiah, Tante Ima Fitriani dan om Fahrizal, Tante Ita Rosmeili dan om Yunarisman, Tante Ira Gusmawati dan om Zuljandri, om Hariansyah dan tante Yuli
14. Buat yg Teristimewa Lia Susiyanti Nurlaili S
15. Buat Abangku Ade Surya Perdana, Decky Sanjaya, Aspin Batubara, Reza Arifahri, Agus Algahni
16. Kepada Sahabat-sahabatku Dian Mina Sari, Ayunda Utari Syam, Rizky Effendi, Yovvi Oktavia, Mifthahul Syiddiqi,Rangga Dean, Erwin Eka Putra,

Ratna Juwita, Putri Mayasari terima kasih atas segala canda dan tawa dan tangisan haru serta bahagia yang telah dibagi dan turut dirasa. Terima kasih atas rasa kekeluargaan yang begitu besar meski tanpa ikatan darah. Jalinan persahabatan ini semoga Allah jaga hingga ke surga. Amin

17. seluruh teman-teman Akuntansi C angkatan 2012 yang tidak bisa di ungkapkan satu-satu yang sudah menemani di kampus Universitas Islam Riau Fakultas Ekonomi ini dan yang sudah banyak memberikan dukungan dan motivasi nya. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah diberikan dengan balasan yang lebih baik lagi *Amin ya Robbalalamin*.

18. Dan semua pihak-pihak yang telah membantu sehingga dapat terselesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan seluruhnya.

Akhirnya penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang dimiliki.

Untuk itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan dari berbagai pihak demi peningkatan kualitas penulisan skripsi ini.

Pekanbaru, 25 November 2018

Penulis

MUHAMMAD TAUFIK HARFAD

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	13
A. Telaah Pustaka.....	13
1. Agency Theory	13
2. Akuntabilitas	14
3. Transparansi	15
4. Laporan Keuangan Pemerintah	16
5. Kapasitas Sumber Daya Manusia.....	18
6. Sistem Pengendalian Intern (SPI).....	21
7. Pemanfaatan Teknologi Informasi	24
8. Pengawasan Keuangan Daerah	26

9. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	28
10. Hubungan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan	32
11. Hubungan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan	33
12. Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan	34
13. Penelitian Terdahulu.....	35
14. Model Penelitian.....	38
B. Hipotesis.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Lokasi dan Objek Penelitian	39
B. Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	39
C. Populasi dan Sampel	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	44
E. Uji Kualitas Data.....	44
F. Teknik Analisis Data.....	46
G. Pengujian Hipotesis.....	47
H. Koefisien Determinasi	48
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	49
A. Sejarah Pemerintahan Kabupaten Bintan.....	49

	B. Visi Dan Misi Kabupaten Bintang	50
	C. Letak Geografis dan Luas Wilayah.....	51
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
	A. Demografi Responden.....	53
	B. Statistis Deskriptif	55
	C. Uji Kualitas Data.....	56
	D. Uji Asumsi Klasik	58
	E. Analisis Data	62
	F. Pengujian Hipotesis.....	64
	G. Pembahasan Hasil Penelitian.....	66
	H. Koefisien Determinasi.....	71
BAB VI	PENUTUP	73
	A. Kesimpulan.....	73
	B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel III.1	Responden Penelitian.....	43
Tabel V.1	Jumlah Responden dan Tingkat Pengembalian.....	53
Tabel V.2	Karakteristik Responden Pada Pemerintah Daerah Kab.bintan	54
Tabel V.3	Descriptive Statistics.....	55
Tabel V.4	Hasil Uji Validitas Data	57
Tabel V.5	Hasil Uji Reliabilitas Data	57
Tabel V.6	Hasil Uji Multikolinearitas.....	60
Tabel V.7	Hasil Uji Autokorelasi.....	62
Tabel V.8	Coefficients	62
Tabel V.9	Anova	66
Tabel V.10	Model Summary.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Model Penelitian.....	38
Gambar V.1	Gambar Histogram	58
Gambar V.2	Gambar Normal P-P Plot.....	59
Gambar V.3	Gambar Scatterplot.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manajemen keuangan atau tata keuangan telah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan sistem keuangan modern. Institusi-institusi pemerintahan saat ini, harus semakin memperbaiki kualitas kinerja keuangan agar mampu mengikuti perkembangan akuntansi karena pengguna informasi terutama masyarakat umum menuntut peningkatan akuntabilitas dan transparansi di institusi-institusi pemerintahan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban mempublikasikan informasi melalui laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, publikasi informasi tersebut dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan para pemakai informasi. Informasi dikatakan bermanfaat jika informasi tersebut mampu di pahami, dapat dipercaya dan digunakan oleh pemakai informasi (Andriani, 2010).

Sistem informasi memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sistem informasi akan mampu dijalankan optimal apabila terdapat sumber daya manusia mumpuni sebagai penggerak dari sistem informasi yang ada. Untuk mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas melalui informasi tersebut, maka diperlukan kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas juga agar mampu menjalankan sistem tersebut dengan baik. Amran (2009) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan

suatu lembaga atau organisasi. Hal ini senada dengan penelitian Wiwik Andrini (2008) yang memperoleh hasil bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya mampu meningkatkan kualitas informasi pada pelaporan keuangan.

Selain sumber daya manusia, hal yang mempengaruhi kualitas informasi akuntansi pada pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menurut Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 65 Tahun 2010, SIKD memberi manfaat atau kemudahan dalam mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Hal tersebut selaras dengan penelitian Fikri Miftahul (2011) yang memperoleh hasil Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian pemanfaatan SIKD dalam proses penyusunan laporan keuangan akan mampu meningkatkan kualitas informasi pada laporan keuangan.

Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan

(fraud). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku.

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat membawa dunia memasuki era baru menuntut informasi yang lebih cepat. Banyak perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis maupun pemerintahan seperti perubahan teknologi produksi, teknologi informasi dan struktur organisasi, yang mendorong organisasi untuk terus berupaya meningkatkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya (supada,2010).

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Akuntabilitas dalam konteks institusi pemerintah didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan instansi pemerintah masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi (Rasul,2003).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib menyampaikan laporan keuangan kepada masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Akuntabilitas dalam tata pemerintahan yang baik sudah disadari dan sudah direfleksikan dalam berbagai peraturan pemerintahan. Laporan pertanggung jawaban kepala daerah merupakan jawaban strategi bagi berbagai tuntutan. Penyajian laporan pertanggungjawaban kepala daerah antara lain Neraca , Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Indra Bastian,2005).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Salah satu pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, reformasi yang

terdapat didalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Berdasarkan undang-undang No. 32 tahun 2004, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Yang kini telah diperbaharui oleh Permendagri No. 71 Tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik; relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan suatu standar penyusunan laporan keuangan milik pemerintahan yang disusun dalam bentuk prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan juga merupakan persyaratan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Rendahnya kualitas laporan dapat disebabkan oleh belum diterapkannya sistem informasi akuntansi keuangan atau kurangnya pemahaman akuntansi dari penyusun laporan keuangan itu sendiri atau kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki, pemanfaatan teknologi informasi yang belum memadai, pengendalian intern serta prinsip-prinsip standar akuntansi pemerintahan belum di terapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah Pusat/Daerah karena SAP merupakan persyaratan sekaligus pedoman yang

mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Pada penelitian Zetra (2009) menunjukkan bahwa kesiapan sarana dan prasarana pendukung seperti Komputer, baik Hardware maupun Software, bagi aparatur di daerah dalam menyampaikan LKPD masih kurang. Banyak SKPD yang hanya memiliki satu unit komputer untuk semua urusan. Padahal untuk menjalankan sistem informasi keuangan secara efektif, idealnya setiap SKPD memiliki komputer khusus untuk penata usaha keuangan. Kendala ini yang mungkin menyebabkan pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum dilaksanakan secara optimal, sehingga hal tersebut mungkin berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu keuangan daerah (Tuasikal, 2007). Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri 51 tahun 2010 tentang pedoman pengawasan penyelenggara pemerintah daerah tahun 2011, yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan, diantaranya dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008), yang menemukan bukti empiris bahwa kapasitas sumber daya manusia signifikan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi signifikan mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pengendalian intern akuntansi signifikan mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak signifikan mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Tantriani Sukmaningrum (2012) meneliti SKPD Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh. Kompetensi sumber daya manusia tidak signifikan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia itu sendiri dari segi kualitas dan kuantitas. Faktor eksternal tidak dapat digunakan sebagai pemoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Faktor eksternal berperan sebagai variable bebas dan tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan, hal ini dikarenakan dinamika perubahan sektor pemerintahan tidak diakomodasi oleh kesiapan sumber daya manusia dan tidak proaktif terhadap tekanan-tekanan publik.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Tantriani Sukmaningrum (2012) di Semarang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitiannya yaitu pada SKPD di Kabupaten Bintan. Hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pemerintah Kabupaten Bintan mendapat Opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Pada tahun 2015.

Alasan lain mengapa diambil responden di wilayah Kabupaten Bintan karena Laporan keuangan kabupaten Bintan selalu menuai Apresiasi positif dan selalu memuaskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kepri, Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten terbaik dalam penyusunan LKPD. Dan dari tahun ke tahun selalu menunjukkan perbaikan ke arah yang lebih baik.

Namun demikian BPK menemukan adanya kelemahan Sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan yaitu, (1) pemerintah kabupaten bintan belum siap dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. (2) pengelolaan persediaan pada pemerintah kabupaten bintan kurang tertib. (3) piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang berasal dari pelimpahan pemerintah pusat belum dapat diyakini kewajarannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka diajukan penelitian dengan judul :**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kapasitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Bagaimana Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Bagaimana Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Bagaimana Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- b. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- c. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- d. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dengan dilaksanakannya penelitian ini antara lain:

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan literatur-literatur akuntansi yang sudah ada, dan memperkuat penelitian sebelumnya yaitu dengan analisis faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
- b. Hasil penelitian untuk menambah wawasan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilihat dari pengaruh faktor kualitatif.
- c. Bagi pemerintah daerah, sebagai wawasan tentang pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
- d. Bagi para akademisi, penelitian ini memberikan kontribusi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, maka penulis membagi kedalam enam bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang menyajikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menjadi acuan pemahaman teoritis dalam penelitian ini, review penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran teoritis serta pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yaitu lokasi penelitian, sampel dan populasi, operasional variabel, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN BINTAN

Dalam bab ini mengemukakan gambaran umum pemerintah kabupaten padang lawas meliputi sejarah berdirinya pemerintah kabupaten Bintan, geografis, visi dan misi pemerintah Bintan, dan struktur Kabupaten Bintan

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian tersebut

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan menutup dengan membuat kesimpulan memberikan saran-saran yang dirasakan perlu sesuai dengan hasil dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Agency Theory

Menurut Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Teori Keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan Eisenhard dalam Pramitha, (2010). Pertama adalah masalah keagenan yang timbul pada saat (a) keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan dari prinsipal dan agen berlawanan dan (b) merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh agen. Permasalahannya adalah prinsipal tidak dapat memverifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu dengan tepat. Kedua adalah masalah pembagian resiko yang timbul pada saat prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap resiko.

Dengan demikian, prinsipal dan agen mungkin memiliki preferensi tindakan yang berbeda dikarenakan adanya perbedaan preferensi resiko. Berkaitan dengan permasalahan keagenan, praktek laporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban

menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Dalam suatu pemerintah demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (*Agency Relationship*). Dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam hubungan keagenan, pemerintah sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipalnya.

2. Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship. Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisiensi tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggung jawab. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Dalam peraturan perundang-undangan menteri dalam negeri mengeluarkan peraturan menteri dalam negeri NO.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri NO. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri NO. 13

Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Pada intinya, semua peraturan tersebut menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. Transparansi

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah, dinyatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Transparan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk efektivitas dan efisiensi penyelenggara tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance Government*).

Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah akan mendapat kepercayaan dan dukungan dari publik, dan pemerintah tentunya akan bekerja lebih serius dan disiplin, proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah lebih partisipatif dan pro

poor, mekanise pengawasan baik internal maupun eksternal akan semakin kuat sehingga terhindar dari praktik KKN (Zetra, 2009).

4. Laporan keuangan pemerintah

Laporan keuangan pada dasarnya adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah. PP Nomor 71 Tahun 2010 menghendaki penyajian laporan keuangan yang berbasis akrual, namun karena anggaran pemerintah masih disusun dengan basis kas maka untuk pelaporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Dengan demikian dalam jangka pendek, pemerintah akan menerapkan dua basis akuntansi yaitu basis akrual dan basis kas. Kedua basis akuntansi ini akan mempunyai jalur tersendiri dalam membentuk laporan keuangan.

Adapun laporan keuangan pokok yang harus disusun oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan

keuangan pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur yaitu pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, pembiayaan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional
Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan
5. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama satu periode tertentu.
6. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau terinci dari angka tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam standar akuntansi pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian keuangan secara wajar.

Pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang di capai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelola sumber daya serta pelaksanaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sesuatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- d. Keseimbangan antar generasi
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Kapasitas sumber daya manusia

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2009).

Sumber daya manusia adalah kesatuan tenaga manusia yang ada dalam suatu organisasi dan bukan sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. Sebagai kesatuan sumber daya manusia harus di pandang sebagai suatu sistem dimana tiap-tiap karyawan merupakan bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi (Matindas,2002:89).

Manusia merupakan salah satu unsur terpenting yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan dan mengembangkan misinya. apabila dalam organisasi setiap individu bekerja dengan baik, berprestasi, bersemangat dan memberikan kontribusi terbaik mereka terhadap organisasi, maka kinerja organisasi secara keseluruhan akan baik. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor internal yang memegang peranan penting berhasil tidaknya suatu organisasi dalam

mencapai tujuan sehingga perlu diarahkan melalui manajemen sumber daya manusia yang efektif dan efisien.

Agar sumber daya manusia mempunyai etos kerja tinggi, terampil dan terlatih sebuah organisasi dapat melakukan pelatihan, pendidikan, dan bimbingan bagi sumber daya manusia. Hanya saja untuk menghasilkan kinerja dan prestasi kerja yang tinggi seorang karyawan tidak hanya perlu memiliki keterampilan, tetapi juga harus memiliki keinginan dan kegairahan untuk berprestasi tinggi karena berkembang tidaknya suatu organisasi, sangat ditentukan oleh anggota atau personel dari organisasi itu sendiri.

Kualitas sumber daya manusia menyangkut dua aspek, yakni aspek fisik, dan aspek nonfisik yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan-keterampilan lain. Oleh sebab itu, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini juga dapat diarahkan kepada kedua aspek tersebut. Untuk meningkatkan kualitas fisik dapat di upayakan melalui program-program kesehatan dan gizi. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan-kemampuan nonfisik tersebut , maka upaya pendidikan dan pelatihan adalah yang paling diperlukan. Upaya inilah yang dimaksudkan dengan pengembangan sumber daya manusia. Mengingat faktor pendidikan sangat dibutuhkan dalam upaya membangun kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah harus menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama.

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Zuliarti (2012), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumberdaya

tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005 dalam Zuliarti, 2012). Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bekerja akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga.

Organisasi juga harus berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia mereka. Pelatihan dan pengembangan membuat karyawan dapat melaksanakan pekerjaan mereka saat ini secara efektif dan mempersiapkan pekerjaan di masa mendatang. Penilaian kinerja adalah penting untuk memvalidasi alat pemilihan, mengukur dampak dari program pelatihan, memutuskan kenaikan gaji dan promosi, dan menentukan kebutuhan akan pelatihan (Griffin, 2004 dalam Zuliarti, 2012).

6. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku.

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan lingkungan yang memengaruhi keseluruhan organisasi dan menjadi atmosfer organisasi dalam melakukan aktivitas. Dengan kata lain, lingkungan pengendalian merupakan pondasi dasar yang mendasari suatu sistem pengendalian intern pemerintah. Apabila lingkungan pengendalian menunjukkan kondisi yang baik, maka dapat memberi pengaruh yang cukup baik bagi suatu organisasi.

Namun sebaliknya, apabila lingkungan pengendalian jelek, mengindikasikan bahwa organisasi tersebut tidak sehat. Hal pertama yang harus dilakukan di dalam unsur lingkungan pengendalian adalah mengidentifikasi hal-hal yang terkait dengan lingkungan pengendalian suatu organisasi, seperti yang tercantum di bawah ini:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
- c. Kepemimpinan yang kondusif.
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat.

- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan SDM.
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern yang efektif.
- h. Hubungan kerja yang baik.

Lingkungan pengendalian intern yang baik diharapkan akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah. Selain itu, diharapkan akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan oleh pihak manajemen pemerintahan. Demikian juga tujuan organisasi dapat tercapai.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko terkait dengan aktivitas entitas mengidentifikasi dan mengelola risiko sehingga entitas dapat meminimalisasi terjadinya kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi. Melalui proses penilaian risiko, setiap entitas dapat mengantisipasi setiap kejadian yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Penafsiran risiko yang baik dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Di samping itu tentunya akan berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan dalam mengendalikan aktivitas organisasi.

3. Kegiatan Pengendalian

Pengendalian didefinisikan sebagai "Pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko. Pengendalian yang baik diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas

informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Akhirnya akan meningkatkan kemampuan manajemen untuk membuat keputusan.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi perlu dikomunikasikan dalam bentuk dan kerangka waktu yang memungkinkan para pihak memahami tanggung jawabnya. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem informasi yang handal dapat memberikan informasi terkait operasional, keuangan, dan perbandingan informasi dalam organisasi. Sistem informasi harus dapat membantu manajemen dalam menjalankan dan mengendalikan operasinya. Sistem informasi menghasilkan laporan, kegiatan usaha, keuangan, dan informasi yang cukup untuk memungkinkan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan instansi pemerintah. Informasi dan komunikasi yang baik dihasilkan dari sistem akan berdampak pada kemampuan manajemen untuk membuat keputusan yang baik dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan informasi laporan keuangan yang handal.

5. Pemantauan

Pemantauan mengandung makna sebagai suatu proses yang menilai kualitas dari kinerja sistem pengendalian. Monitoring dapat dilakukan pada saat kegiatan berjalan (on going), evaluasi terpisah atau kombinasi keduanya. Monitoring sistem pengendalian intern dilaksanakan secara berkelanjutan dan melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan telaah lainnya. Monitoring berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, telaah, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern. Evaluasi tersebut dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan telaah harus segera diselesaikan. Tindak lanjut tersebut dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan telaah yang ditetapkan.

7. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat membawa dunia memasuki era baru menuntut informasi yang lebih cepat. Banyak perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis maupun pemerintahan seperti perubahan teknologi produksi, teknologi informasi dan struktur organisasi, yang mendorong organisasi untuk terus berupaya meningkatkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya (supada,2010).

Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson Et Al., 2000). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (Hardware dan Software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipat gandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Teknologi Informasi (TI) meliputi segala alat maupun metode yang terintegrasi untuk digunakan dalam menjaring atau menangkap data (capture), menyimpan (saving), mengolah (process), mengirim (distribute), atau menyajikan kebutuhan informasi secara elektronik ke dalam berbagai format, yang bermanfaat bagi user (pemakai informasi). Teknologi ini dapat berupa kombinasi perangkat keras dan lunak dari komputer (manual) maupun prosedur, operator, dan para manajer dalam suatu sistem yang terpadu satu sama lain.

Menurut model yang dikembangkan Thompson et al. (1991) dalam Tjhai (2003:5) yang mengadopsi sebagian teori yang di usulkan oleh Trandis (1980), dalam Astuti dan I Ketut (2009), faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan Teknologi Informasi adalah sebagai berikut :

- a. Faktor sosial
- b. Affect (perasaan individu)
- c. Kesesuaian tugas
- d. Konsekuensi jangka panjang
- e. Kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi
- f. Kompleksitas
- g. Keandalan (reability) pelaporan keuangan pemerintah daerah

Menurut peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi yang memiliki kualitas andal adalah apabila informasi tersebut bebas

dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

8. Pengawasan keuangan daerah

Menurut Sumarsono (2010 : 245) secara umum pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggara suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan. Pihak yang paling bertanggung jawab atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan dan rencananya ini adalah pihak atasan, maka pengawasan sesungguhnya mencakup baik aspek pengendalian maupun aspek pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap bawahannya.

Tujuan pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dikenali, agar dapat segera di ambil tindakan koreksi. Melalui tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat mencapai tujuannya secara maksimal.

Fungsi pengawasan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawasan fungsional baik eksternal maupun internal pemerintah. Pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK yang menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR. Sementara itu, pengawasan internal dilakukan oleh inspektorat jendral/inspektorat utama pada masing-masing departemen/lembaga dan badan pengawasan keuangan dan

pembangunan (BPKP) pada semua departemen atau lembaga (termasuk BUMN). Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal maupun eksternal tersebut diatas bersifat post audit.

Menurut Sumarsono (2010 : 249) adapun jenis-jenis pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain sebagai berikut :

a. Pengawasan menurut sifatnya

1. Pengawasan preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan. Pengawasan preventif pada dasarnya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Pengawasan detektif

Pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan. Pengawasan detektif biasanya dilaksanakan setelah dilakukannya tindakan yaitu dengan membandingkan antara hal yang terjadi dengan hal yang seharusnya terjadi

b. Pengawasan menurut ruang lingkupnya

1. Pengawasan internal

Pengawasan internal dalam arti sempit adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pengawas yang berasal dari lingkungan internal departemen atau lembaga negara yang diawasinya. Dengan demikian, dalam pengawasan internal dalam arti sempit ini, baik aparat pengawas maupun pihak yang diawasi, sama-sama bernaung dibawah pimpinan menteri atau ketua lembaga negara yang sama. Sedangkan pengawas internal dalam arti luas adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lembaga khusus pengawasan, yang dibentuk secara internal oleh pemerintah atau lembaga eksekutif. Tujuan utama dari pengawasan internal dalam arti luas ini tidak hanya untuk melakukan tindakan verifikasi, melainkan juga dimaksudkan untuk membantu pihak yang

diawasi dalam menunaikan tugasnya secara lebih baik. Dalam struktur organisasi pemerintah Indonesia, fungsi pengawasan internal dalam arti luas ini diselenggarakan oleh BPKP dan inspektorat jenderal pembangunan (irjenbang).

2. Pengawasan eksternal pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi eksekutif. Dengan demikian, dalam pengawasan eksternal ini, antara pengawasan dengan pihak yang diawasi tidak lagi terdapat hubungan kedinasan. Di Indonesia, fungsi pengawasan eksternal ini antara lain diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), badan pemeriksa keuangan (BPK) dan secara langsung oleh masyarakat.

9. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah no. 71 thn 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan adalah :

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

- b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value)
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambial keputusan.
- d. Lengkap
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat di andalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut :

- a. Penyajian jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh beda
- c. Netralitas
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan dengan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat

dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Berikut ini merupakan kendala informasi yang relevan dan andal menurut

PSAK (IAI, 2015):

1. Tepat Waktu

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi kurang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan.

2. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang pervasif daripada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu harus dipikul oleh pemakai informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pemakai lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi; misalnya, penyediaan informasi lanjutan kepada kreditur mungkin mengurangi biaya pinjaman yang dipikul perusahaan. Karena alasan inilah maka sulit untuk mengaplikasikan uji biaya- manfaat pada kasus tertentu. Namun demikian, komite penyusun standar akuntansi keuangan pada khususnya, seperti juga para penyusun dan pemakai laporan keuangan, harus menyadari kendala ini.

3. Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif

Dalam praktek, keseimbangan atau *trade-off* di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional.

Sedangkan menurut ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2015 No. 1 paragraf 10, menjelaskan bahwa “Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.”

Adapun tujuan kualitatif yang dirumuskan APB Statemant No.4 adalah sebagai berikut.

1. *Relevance*
Memilih informasi yang benar-benar sesuai dan dapat membantu pemakai laporan dalam proses pengambilan keputusan.
2. *Understandability*
Informasi yang dipilih untuk disajikan bukan saja yang penting tetapi juga harus informasi yang dimengerti pemakainya.
3. *Verifiability*
Hasil akuntansi itu harus dapat diperiksa oleh pihak lain yang akan menghasilkan pendapat yang sama.
4. *Neutrality*
Laporan akuntansi itu netral terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi dimaksudkan untuk pihak umum bukan pihak-pihak tertentu saja.
5. *Timeliness*
Laporan akuntansi hanya bermanfaat untuk pengambilan keputusan apabila diserahkan pada saat yang tepat.
6. *Comparability*
Informasi akuntansi harus dapat saling dibandingkan, artinya akuntansi harus memiliki prinsip yang sama baik untuk suatu perusahaan manapun perusahaan lain.
7. *Completeness*
Informasi akuntansi yang dilaporkan harus mencakup semua kebutuhan yang layak dari para pemakai.”

10. Hubungan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Infomasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

SDM merupakan human capital di dalam organisasi. Human capital merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat

digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan *economic rent*. Karyawan yang dengan human capital tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi (Sugeng dan Imam, 2000 dalam Sutaryo, 2011).

Menurut Sulistyawati (2006) dalam Sutaryo (2011), SDM merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan dan efektifitas implementasi sistem akuntansi keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Menurut Guy et al. (2002), kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi SDM yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam pelaporan keuangan PEMDA.

Walaupun sistem akuntansi yang dibangun sudah baik tetapi sumber daya manusianya tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakannya, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi yang ada dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi bisa jadi kualitasnya buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, salah satunya kualitas informasi sebagaimana yang masih banyak ditemui dalam pelaporan keuangan pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut penulis menduga terdapat hubungan positif antara kapasitas sumber daya manusia dengan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

11. Hubungan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*.

Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin kualitas laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan fondasi *good governance* dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan LKPD.

12. Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Perkembangan IT dan web, serta regulasi, mempunyai dampak yang signifikan pada operasi, sistem, dan kualitas informasi. Dinamika perubahan yang terjadi harus tetap dikontrol agar tidak mengakibatkan sebuah kerugian atau potensi kerugian daerah dan/ atau negara. Perkembangan IT dan web, serta regulasi juga mempunyai dampak yang signifikan pada operasi, sistem, dan kualitas informasi. Orang-orang

dalam organisasi harus waspada terhadap isu-isu global dan mengembangkan sebuah pemahaman serta dampaknya pada organisasi.

Penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi pada organisasi sektor publik sudah pernah dilakukan. Uraian dan temuan empiris mengenai teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, multiprocessing.

Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Penelitian Donnelly et al., (1994) dalam Zuliarti (2012) menemukan bahwa sistem/teknologi informasi yang dimiliki pemerintah daerah di Skotlandia belum begitu baik. Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

13. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan sektor publik masih relatif sedikit, karena bidang pemerintahan masih terbilang baru dalam dunia akuntansi Indonesia, berbeda dengan pada sektor swasta. Pada sektor swasta, kualitas laporan keuangan dapat dilihat hanya dari laporan keuangan yang bersifat kuantitatif yang biasanya tercermin dalam laba atau earnings, sedangkan pada sektor publik, penilaian atas kualitas

laporan keuangan tidak dapat dinilai hanya dari laporan keuangan yang dihasilkan saja atau dari faktor yang bersifat kuantitatif. Dilihat dari komponen laporan keuangan antara sektor swasta dan sektor publik, komponen dalam laporan keuangan sektor publik memang lebih rumit dan kompleks, hal ini mengakibatkan perbedaan persepsi atas kualitas laporan keuangan.

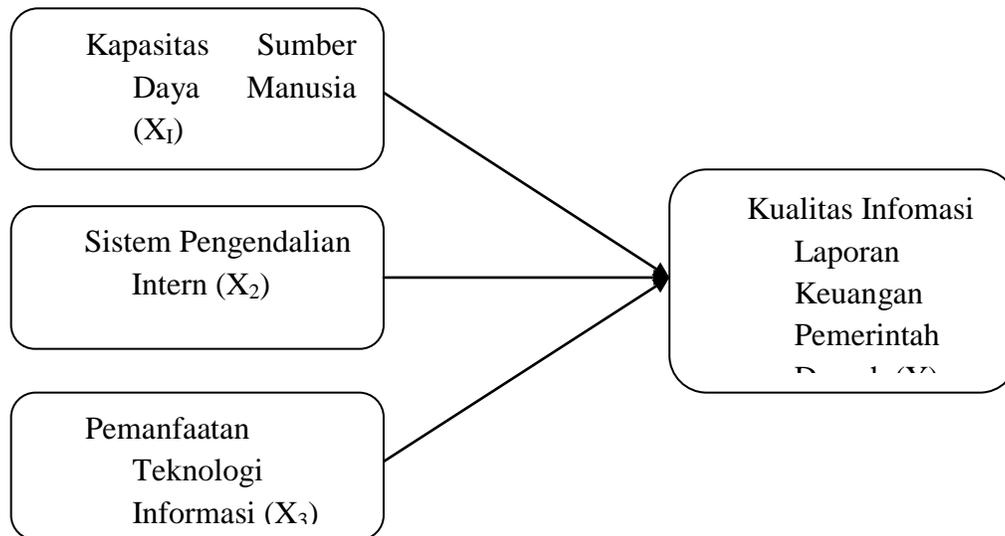
Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul penelitian	Variabel	Hasil
1	Choirunisah (2008)	faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi instansi studi pada KPPN Malang.	Independen : kualitas informasi laporan keuangan dependen : sistem akuntansi instansi	Hasil penelitiannya menyatakan Kemampuan sumber daya manusia dan organisasi tim berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi keuangan satuan kerja.
2	Indriasari dan Nahartyo (2008)	pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan	Independen: kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi dependen:	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan

		keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah kota Palembang dan kabupaten Ogan Ilir).	nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah	pengendalian intern akuntansi mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan.
3	Nugraha dan Susanti (2010)	Penelitian pengaruh sistem pengendalian internal terhadap reliabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Independen: sistem pengendalian internal dependen: reliabilitas laporan keuangan pemerintah	Hasil penelitiannya menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan.
4	Winidyaningrum dan Rahmawati (2010)	pengaruh sumber daya manusia dan informasi teknologi pemanfaatan kehandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian internal akuntansi.	Independen: sumber daya manusia dan informasi teknologi pemanfaatan kehandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah dependen: intervening pengendalian internal	Hasil penelitiannya menyatakan Sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, tetapi tidak signifikan terhadap ketepatan waktu. Pemanfaatan TI berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan dan ketepatan waktu.

14. Model penelitian

Gambar II.1
Model Penelitian



B. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

- H₁ :Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- H₂ :Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- H₃ :Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- H₄ :Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas

Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi/Objek penelitian

Penelitian ini dilakukan di pemerintah Kabupaten Bintan tepatnya di lingkungan SKPD Kabupaten Bintan. Waktu penelitian atau pengumpulan data sampai dengan penyelesaian direncanakan selama lebih kurang Tiga bulan.

B. Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel Penelitian

variabel adalah suatu cara untuk mengatur suatu konsep dan bagaimana caranya konsep harus di ukur sehingga terdapat variabel-variabel yang menyebabkan masalah lain dari suatu variabel yang situasi dan kondisinya tergantung oleh variabel lain.

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah. Menurut peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 keandalan adalah informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kuesioner yang pernah digunakan oleh Tantriani Sukmaningrum (2012). Terdapat empat indikator, yaitu: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, (4) dapat dipahami, dengan menggunakan skala likert satu sampai lima. Nilai tersebut dimulai dari (1) "Sangat Tidak Setuju" hingga (5) "Sangat Setuju"

2. Variabel Independen (X)

a. Kapasitas Sumber daya Manusia (X₁)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai manusia yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Kapasitas menurut Guy et al. (2002) adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kuesioner yang pernah digunakan oleh Tantriani Sukmaningrum (2012). Terdapat tiga indikator, yaitu: (1) Tanggung Jawab, (2) Pelatihan, (3) Pengalaman, dengan menggunakan skala likert satu sampai lima. Nilai tersebut dimulai dari (1) "Sangat Tidak Setuju" hingga (5) "Sangat Setuju"

b. Sistem Pengendalian Intern (X₂)

Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan atau fraud (Afriyanti, 2011)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kuesioner yang pernah digunakan oleh Tantriani Sukmaningrum (2012). Variabel sistem pengendalian intern ini dapat diukur dengan instrumen yang dibuat oleh Xu, et al. (2003) dan dikembangkan oleh Choirunisah (2008). Terdapat lima indikator, yaitu: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian resiko, (3) aktivitas pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, (5) pemantauan, dengan menggunakan skala likert satu sampai lima. Nilai tersebut dimulai dari (1) "Sangat Tidak Setuju" hingga (5) "Sangat Setuju"

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₃)

Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan, (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., 2000). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya (Indriasari dan Nahartoyo, 2008).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kuesioner yang pernah digunakan oleh Tantriani Sukmaningrum (2012). Terdapat tiga indikator, yaitu: (1) Interaksi dengan sistem, (2) Pemahaman terhadap peraturan dan standar, (3) Kontrol terhadap

SDM, dengan menggunakan skala likert satu sampai lima. Nilai tersebut dimulai dari (1) "Sangat Tidak Setuju" hingga (5) "Sangat Setuju".

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD di Pemerintahan Kabupaten Bintan. Adapun jumlah keseluruhan populasi adalah sebanyak 37 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sampel yang di ambil dalam penelitian ini adalah 28 SKPD. alasan peneliti hanya memasukkan 1 kecamatan dalam populasi dan sampel dikarenakan terkendala oleh jarak dan waktu. Setiap sampel masing-masing sebanyak 3 responden. Oleh karena itu, peneliti menyebar responden pada SKPD di Kabupaten Bintan sebanyak 84 (28x3). Responden dalam penelitian ini adalah Kepala SKPD, Kepala Bagian Keuangan, dan Kepala Bagian Perencanaan Program. Alasan pemilihan responden adalah karena Kepala SKPD, Kepala Bagian Keuangan, dan Kepala Bagian Perencanaan Program bertanggungjawab dalam pembuatan laporan keuangan pada masing-masing SKPD dan juga setiap bagian tersebut merupakan elemen penting dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah, karena terlibat langsung dan sangat memahami kegiatan akuntansi. . Pengambilan sampel terhadap responden dilakukan secara *Purposive sampling*, yaitu suatu metode pemilihan sampel dengan memberikan kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi untuk dijadikan sampel

penelitian. Pengambilan sampel dalam penelitian ini disebabkan sebagian objek yang tersebar diwilayah yang cukup luas, serta keterbatasan dana, tenaga dan waktu.

Tabel III.1
Responden Penelitian

N O	Unit/instansi	Responden
1	Sekretariat Daerah	3
2	Sekretariat DPRD	3
3	Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah	3
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3
5	Dinas Kesehatan	3
6	Dinas Pekerjaan Umum	3
7	Dinas Perhubungan	3
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3
9	Dinas Sosial	3
10	Dinas Tenaga Kerja	3
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3
12	Dinas Pertanian dan Kehutanan	3
13	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan	3
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	3
15	Dinas Pertambangan dan Energi	3
16	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	3
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3
18	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	3
19	Badan Lingkungan Hidup	3
20	Badan Kepegawaian Daerah	3
21	Badan Promosi, Investasi & Pelayanan Perizinan Terpadu	3
22	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB	3
23	Badan Pelaksanaan Penyuluhan & Ketahanan Pangan	3
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3
25	Inspektorat Daerah	3
26	Kantor Perpustakaan dan Arsip	3
27	RSUD	3
28	Kecamatan bukit bestari	3

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data merupakan keterangan yang dapat memberikan gambaran atas suatu keadaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek. Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik sekelompok orang atau seseorang yang menjadi subjek penelitian berupa jawaban responden terhadap item-item pertanyaan yang terdapat tiga instrumen penelitian yaitu : Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari para responden.

E. Uji Kualitas Data

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrument (kuesioner) yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengkorelasi setiap skor variabel jawaban responden dengan total skor masing-

masing variabel, kemudian hasil korelasi dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf signifikan 0,05. Tinggi rendahnya validitas instrument akan menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud.

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah data untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji ini dilakukan dengan menghitung nilai cronbach alpha untuk masing-masing variabel. Suatu alat dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha $> 0,6$.

c. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah jika distribusi datanya normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat grafik normal P-P Plot dan uji Kolmogorov Smirnov. Grafik histogram membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dalam suatu model regresi salah satunya adalah dengan melihat nilai tolerance dan lawannya, dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan adalah apabila nilai tolerance $> 0,1$ atau sama dengan nilai $VIF < 10$ berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Pendeteksian mengenai ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara

SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y yang telah dipredkisi, dan sumbu X adalah residual yang telah di-studentized.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Tujuan dari analisis data adalah mendapatkan informasi relevan yang terkandung didalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linier berganda dan penganalisan data menggunakan bantuan komputer dengan program SPSS versi 23 . model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

Model :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y = Kualitas pelaporan keuangan

a = konstanta

b1...bn = nilai koefisien regresi

X₁ = Kapasitas Sumber Daya Manusia

X₂ = pemanfaatan teknologi informasi

X₃ = Sistem pengendalian intern

e = error

G. Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Secara Simultan (Uji-F)

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen, dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikan menggunakan SPSS dengan signifikan level 0,05 ($\alpha=5\%$). Jika nilai signifikan lebih besar dari α maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), yang berarti secara simultan variabel-variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan lebih kecil dari α maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan), hal ini berarti secara simultan variabel-variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

2. Pengujian Secara Parsial (Uji-t)

Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikan $t > 0,05$ maka hipotesis ditolak. Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan $t \leq 0,05$ maka hipotesis diterima. Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

I. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Semakin R^2 mendekati satu maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R^2 semakin kecil maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen sangat terbatas.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

A. Sejarah Pemerintahan Kabupaten Bintan

Kabupaten Bintan sebelumnya merupakan Kabupaten Kepulauan Riau. Kabupaten Kepulauan Riau telah dikenal beberapa abad yang silam tidak hanya di nusantara tetapi juga di manca-negara. Wilayahnya mempunyai ciri khas terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di Laut Cina Selatan, karena itulah julukan Kepulauan “Segantang Lada” sangat tepat untuk menggambarkan betapa banyaknya pulau yang ada di daerah ini. Pada kurun waktu 1722-1911, terdapat dua Kerajaan Melayu yang berkuasa dan berdaulat yaitu Kerajaan Riau Lingga yang pusat kerajaannya di Daik dan Kerajaan Melayu Riau di Pulau Bintan.

Pada tahun 1983, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1983, telah dibentuk Kota Administratif Tanjung pinang yang membawahi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung pinang Barat dan Kecamatan Tanjung pinang Timur, dan pada tahun yang sama sesuai dengan peraturan pemerintah No. 34 tahun 1983 telah pula dibentuk Kotamadya Batam. Dengan adanya pengembangan wilayah tersebut, maka Batam tidak lagi menjadi bagian Kabupaten Kepulauan Riau. Berdasarkan Undang-Undang No. 53 tahun 1999 dan UU No. 13 tahun 2000, Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi 3 kabupaten yang terdiri dari : Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna. Wilayah kabupaten Kepulauan Riau hanya meliputi 9 kecamatan, yaitu : Singkep, Lingga, Senayang, Teluk Bintan, Bintan Utara, Bintan Timur, Tambelan, Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur. Kecamatan Teluk Bintan merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Galang. Sebahagian wilayah Galang dicakup oleh Kota

Batam. Kecamatan Teluk Bintang terdiri dari 5 desa yaitu Pangkil, Pengujan, Penaga, Tembeling dan Bintang Buyu.

Kemudian dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 tahun 2001, Kota Administratif Tanjungpinang berubah menjadi Kota Tanjungpinang yang statusnya sama dengan kabupaten. Sejalan dengan perubahan administrasi wilayah pada akhir tahun 2003, maka dilakukan pemekaran kecamatan yaitu Kecamatan Bintang Utara menjadi Kecamatan Teluk Sebong dan Bintang Utara. Kecamatan Lingga menjadi Kecamatan Lingga Utara dan Lingga. Pada akhir tahun 2003 dibentuk Kabupaten Lingga sesuai dengan UU No. 31/2003, maka dengan demikian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau meliputi 6 Kecamatan yaitu Bintang Utara, Bintang Timur, Teluk Bintang, Gunung Kijang, Teluk Sebong dan Tambelan. Dan berdasarkan PP No. 5 Tahun 2006 tanggal 23 Februari 2006, Kabupaten Kepulauan Riau berubah nama menjadi Kabupaten Bintang.

B. Visi dan Misi Kabupaten Bintang

a. Visi Kabupaten Bintang

Terwujudnya Kabupaten Bintang yang Madani dan Sejahtera Melalui Pencapaian Bintang Gemilang 2025 (Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata, dan Kebudayaan)".

b. Misi Kabupaten Bintang

1. Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan.
2. Mewujudkan pelayanan infrastruktur daerah yang berkualitas, terintegrasi dan merata.
3. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis sebagai langkah melayani masyarakat dengan sepenuh hati.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi global.
5. Mewujudkan pembangunan karakter masyarakat yang religius dan berbudaya Melayu sebagai landasan pembangunan masyarakat.
6. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan.
7. Memberdayakan pemuda sebagai pelopor pembangunan di Kabupaten Bintan.
8. Mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

C. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Secara geografis, wilayah kabupaten bintang terletak antara 0°06'17"- 1°34'52" lintang utara dan 104°12'47" Bujur Timur di sebelah Barat - 108°02'27" Bujur Timur di sebelah Timur. Secara keseluruhan luas wilayah kabupaten Bintang adalah 87.717,84 Km² terdiri atas wilayah daratan seluas 1.319,51 km² (1,50%) dan wilayah laut seluas 86.398,33 km² (98,50%).

Secara administrasi kewilayahan, Kabupaten Bintang berbatasan dengan daerah-daerah lain sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Anambas
- Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga
- Sebelah Barat : Kota Batam Dan Kota Tanjung Pinang
- Sebelah Timur : Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten bintang memiliki 240 buah pulau besar dan kecil. Dari jumlah tersebut hanya 49 buah diantaranya yang berpenghuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni namun sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan. Secara administrasi, kabupaten bintang terdiri dari 10 kecamatan. 36 desa, dan 15 kelurahan. 3 kecamatan terletak di luar pulau bintang yaitu kecamatan Bintang Pesisir, Kecamatan Mantang dan Kecamatan Tambelan sedangkan sisanya terletak di pulau Bintang.

Pulau Bintang tidak memiliki perbedaan ketinggian yang menyolok yaitu antara 0-350 meter dari permukaan laut. Penonjolan puncak-pucak bukit antara lain

Gunung Bintan 348 meter, Gunung Bintan kecil 196 meter. Bukit-bukit lainnya merupakan bukit-bukit dengan ketinggian di bawah 100 meter. Bukit-bukit tersebut merupakan daerah hulu-hulu sungai yang sebagian besar mengalir ke arah utara dan selatan dengan pola sub paralel, sedangkan pola anak-anak sungainya berpola sub radial. Sungai-sungai itu umumnya pendek-pendek, dangkal dan tidak lebar.

BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Demografi Responden

Dalam penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 84 eksemplar. Data yang diperoleh dari penelitian ini diambil dengan cara menyebarkan kuesioner pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala SKPD, Kepala Bagian Keuangan, dan Kepala Bagian Perencanaan Program. Penyebaran kuesioner dimulai dari tanggal 21 September 2018 dan selesai pada tanggal 25 Oktober 2018. Total kuesioner yang dibagikan adalah 84 kuesioner (100%), Total kuesioner yang dikembalikan 63 Kuesioner (75,00%), dimana Total Kuesioner yang tidak kembali 21 kuesioner (25,00%), sehingga total kuesioner yang dapat dianalisis 63 kuesioner. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel V.1
Jumlah Responden dan Tingkat Pengembalian

Keterangan	Jumlah	Persentase
Total kuesioner yang dikirim	84	100%
Total kuesioner yang kembali	63	75,00%
Total Kuesioner yang tidak kembali	21	25,00%
Total kuesioner yang dapat dianalisis	63	75,00%

Sumber: Data Olahan, 2018

Karakteristik responden meliputi jenis kelamin, Umur, Pendidikan Terakhir dan lama bekerja. Adapun karakteristik responden Pada Pemerintah Daerah kabupaten Bintan adalah sebagai berikut:

Tabel V.2
Karakteristik Responden Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan

No	Karakteristik	Jumlah	Presentase (%)
1	Jenis kelamin		
	1.Laki-Laki	34	53,97%
	2.Perempuan	29 orang	46,03%
	Total	63 orang	100%
2	Umur		
	1. 20-30 Tahun	1 orang	1,59%
	2. 31-40 Tahun	20 orang	31,74%
	3. 41-50 Tahun	26 orang	41,27%
	4. > 50 Tahun	16 orang	25,40%
	Total	63 orang	100 %
4	Pendidikan Terakhir		
	1. SMA	5 orang	7,94%
	2. D3	5 orang	7,94%
	3. S1	45 orang	71,42%
	4. S2	8 orang	12,70%
	Total	63 orang	100 %
5	Lama Bekerja		
	1. 1-5 Tahun	1	1,59%
	2. 6-10 Tahun	9 orang	14,29%
	3. > 10 Tahun	53 orang	84,12%

		orang	
	Total	63 orang	100 %

Sumber: Data Olahan, 2018

Berdasarkan tabel V.2, menunjukkan bahwa dari 63 responden. jumlah responden laki-laki sebanyak 34 orang atau sekitar 53,97% dan jumlah responden perempuan yang berjumlah 29 orang atau sekitar 46,03%.

Berdasarkan tabel V.2 diatas terlihat bahwa berdasarkan Umur pegawai Pemerintah Daerah kabupaten Bintan menunjukkan bahwa dari 63 responden. 20-30 tahun berjumlah 1 orang atau 1,59 %, 31-40 tahun berjumlah 20 orang atau 31,74%, 1-50 berjumlah 26 orang atau 41,27%, dan sedangkan untuk >50 tahun lainnya sebanyak 16 orang atau 25,40% .

Berdasarkan tabel V.2 diatas terlihat bahwa berdasarkan pendidikan terakhir Pada Pemerintah Daerah kabupaten Bintan menunjukkan bahwa pendidikan terakhir SMA sebanyak 5 responden atau 7,94%, untuk Diploma 3 (D3) yaitu sebanyak 5 responden atau 7,94% dan dengan presentase terbanyak bergelar Strata 1 (S1) yaitu berjumlah 45 responden atau 71,42% dan persentase bergelar Pascasarjana (S2) yaitu sebanyak 8 responden atau 12,70%.

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa dari 63 responden. Jumlah lama bekerja responden 1-5 tahun sebanyak 8 orang atau 22,22 %, dan jumlah lama

bekerja 6-10 Tahun sebanyak 16 orang atau 44,45%, sedangkan lama bekerja >10 tahun sebanyak 12 orang atau 33,33%.

B. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menunjukkan gambaran umum kecenderungan sampel yang diobservasi tabel V.3 menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif.

Tabel V.3

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	63	29	39	34,46	2,912
	63	30	44	38,92	3,456
	63	15	25	21,51	2,242
	63	30	40	34,89	2,515
d N (listwise)	63				

Sumber : Data Output SPSS, 2018

Berdasarkan tabel V.3 dapat dijelaskan bahwa, dalam penelitian ini terdapat 3 variabel independen yaitu Pengendalian Internal (X_1) Kapasitas Sumber Daya Manusia, (X_2) Sistem Pengendalian Intern, (X_3) Pemanfaatan Teknologi Informasi, serta terdapat satu variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Kapasitas Sumber Daya Manusia mempunyai nilai minimum 29 dan maksimum 39, nilai rata-rata jawaban responden adalah 34,46 dengan standar deviasi 2,912. Sistem Pengendalian Intern mempunyai nilai minimum 30 dan maksimum 44, nilai rata-rata jawaban responden adalah 38,92 dengan standar deviasi 3,456. Pemanfaatan Teknologi Informasi mempunyai nilai minimum 15 dan maksimum 25, nilai rata-rata jawaban responden adalah 21,51 dengan standar deviasi 2,242. Untuk

variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mempunyai nilai minimum 30 dan maksimum 40, nilai rata-rata jawaban responden adalah 34,89 dengan standar deviasi 2,515.

C. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Validitas data dapat ditentukan oleh proses pengukuran yang kuat. Suatu instrument dikatakan mempunyai validitas yang kuat apabila instrument tersebut mengukur apa yang sebenarnya diukur. Uji validitas penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah pertanyaan/pernyataan pada kuesioner yang telah diedarkan dapat mengukur variabel yang akan diukur. Hasil pengujian validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.4
Hasil Uji Validitas Data

Variabel	<i>Pearson correlation</i>	Kesimpulan
Kapasitas Sumber Daya Manusia	0,465** - 0,822**	Valid
Sistem Pengendalian Intern	0,461** - 0,847**	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,650** - 0,806**	Valid
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,445** - 0,677**	Valid

Sumber : Data Output SPSS, 2018

Hasil pengujian validitas yang disajikan pada tabel V.4 dapat dilihat bahwa skor masing-masing butir dan skor total (*pearson correlation*) menunjukkan korelasi yang positif dan signifikan pada level 0,01 sehingga seluruh kuesioner dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik *reliability analyze* dimana suatu instrument dapat dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien *cronbach* atau alpha sebesar $<0,60$ tidak reliabel sedangkan $>0,60$ reliabel. Hasil uji reliabilitas data dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.5
Hasil Uji Reliabilitas Data

Variabel	Jumlah Item	Cronbach Alpha	Kesimpulan
Kapasitas Sumber Daya Manusia	8	0,792	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern	9	0,827	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	5	0,803	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	8	0,602	Reliabel

Sumber : Data Output SPSS, 2018

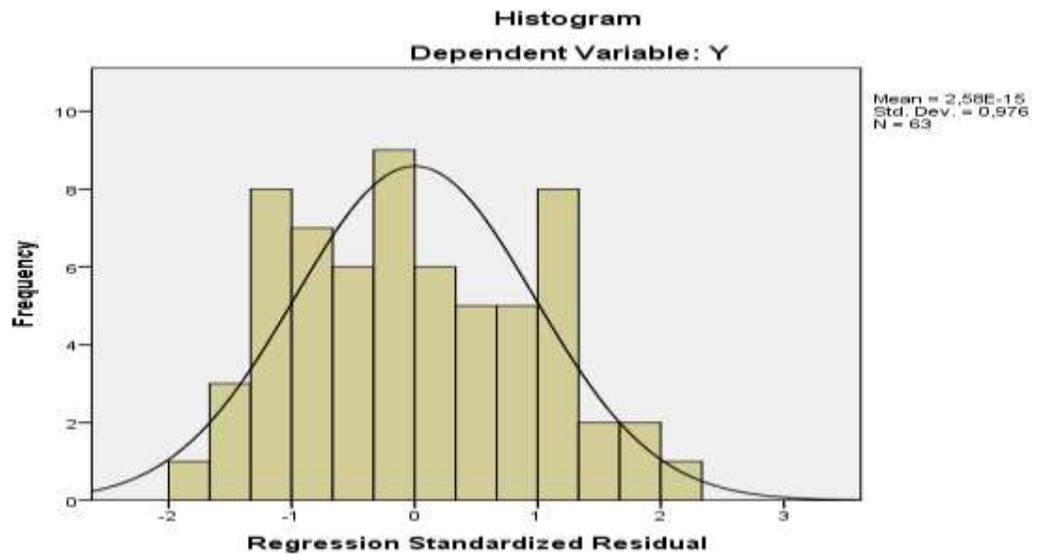
Hasil pengujian reliabilitas yang disajikan pada tabel V.5 menunjukkan tidak ada koefisien *cronbach alpha* yang kurang dari 0,60, sehingga instrument tersebut reliabel untuk digunakan.

D. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependent dan independent mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas dapat dilihat melalui *histogram* ataupun grafik normal *probability plot*, pada penelitian ini tampak pada gambar V.1 berikut:

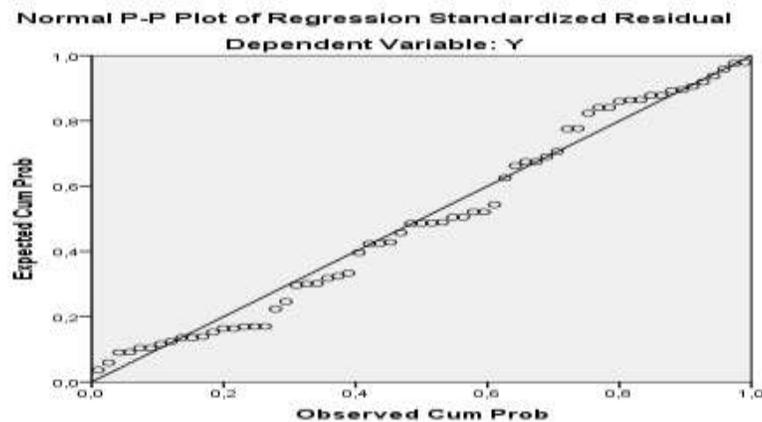
Gambar V.1



Sumber : Data Output SPSS, 2018

Histogram pada gambar V.1 diatas telah memperlihatkan posisi normal, dimana tidak terjadi posisi miring (*skewness*) dan kurva memiliki keseimbangan tepat ditengah, dengan demikian menunjukkan bahwa data-data pada variabel penelitian berdistribusi normal (Ghazali, 2001).

Gambar V.2



Sumber : Data Output SPSS, 2018

Berdasarkan gambar V.2 dapat dilihat bahwa penyebaran data berada disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, oleh karena itu model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas diukur melalui nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Nilai yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance <0.10 atau sama dengan nilai VIF >10. Pada data diatas, terlihat variabel independen memiliki nilai Tolerance >0.10 dan VIF <10. Oleh karena itu, variabel independen penelitian ini terbebas dari gejala multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas untuk model regresi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel V.6 berikut ini :

Tabel V.6
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Kapasitas Sumber Daya Manusia	0,845	1,183	Tidak terjadi multikolinearitas
Sistem Pengendalian Intern	0,957	1,044	Tidak terjadi multikolinearitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,867	1,154	Tidak terjadi multikolinearitas

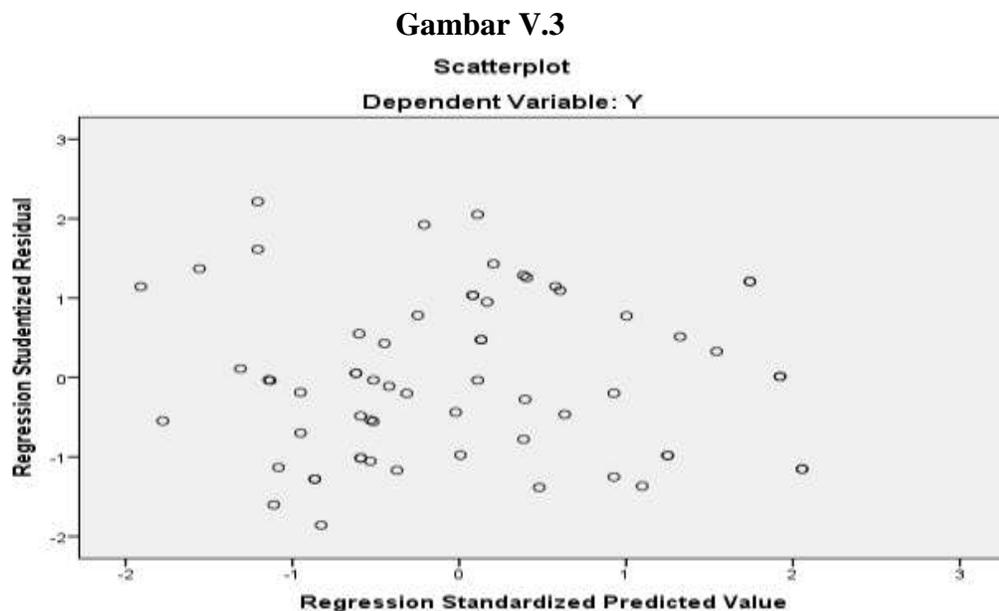
Sumber : Data Output SPSS, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil uji multikolinearitas variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia memiliki nilai VIF 1,183 dan nilai *tolerance* 0,845; variabel Sistem Pengendalian Intern memiliki nilai VIF

1,044 dan nilai *tolerance* 0,957; dan variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki nilai VIF 1,154 dan nilai *tolerance* 0,867. Dari ketiga variabel independen tersebut semua nilai toleransi berada diatas atau $>0,1$ dan nilai VIF dibawah atau <10 . Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari pengaruh multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedasitas

Untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilihat dari grafik *scatterplot*. Heterokedastisitas terjadi apabila titik-titik membentuk pola tertentu, jika tidak ada pola yang jelas dan menyebar maka dapat dikatakan data penelitian terbebas dari gejala heterokedastisitas. Berikut hasil uji Heterokedastisitas dapat dilihat pada Gambar V.3 berikut ini :



Sumber : Data Ouput SPSS, 2018

Berdasarkan gambar V.3 dapat dilihat bahwa, titik-titik penyebaran tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar maka tidak terjadi heteroskedastisitas, oleh karena itu model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi Autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat angka Durbin Watson. Secara umum bisa diambil patokan sebagai berikut:

1. Angka D-W dibawah -2 berarti ada Autokorelasi positif.
2. Angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada Autokorelasi.
3. Angka D-W diatas +2 berarti ada Autokorelasi negatif.

Tabel V.7
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.638 ^a	.408	.377	1,985	2,304

^a Predictors: (Constant), X3, X2, X1

^b Dependent Variable: Y

Pada tabel V.7 terlihat bahwa angka Durbin Watson diatas 2 yaitu sebesar 2,304 yang berarti tidak ada autokorelasi. Dan dapat disimpulkan bahwa regresi ini baik karena terbebas dari autokorelasi.

E. Analisis Data

Analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. Hasil analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 23 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.8

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9,752	3,991		2,443	,018
	,289	,094	,335	3,069	,003
	,213	,075	,293	2,858	,006
	,320	,121	,285	2,652	,010

Dependent Variable: Y

Berdasarkan Tabel V.8 diatas maka dibuat persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 9,752 + 0,289X_1 + 0,213X_2 + 0,320X_3$$

Hasil dan pembahasan regresi diatas adalah:

- Nilai Konstanta (α) sebesar 9,752 artinya, jika Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi bernilai konstan maka Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bernilai 9,752.

- b. Nilai koefisien regresi variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia (X_1) bernilai 0,289 ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia sebesar 1 maka akan terjadi peningkatan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,289 dengan asumsi variabel ini bernilai konstan.
- c. Nilai koefisien regresi variabel Sistem Pengendalian Intern (X_2) bernilai 0,213. ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan Sistem Pengendalian Intern sebesar 1 maka akan terjadi peningkatan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,213, dengan asumsi variabel ini bernilai konstan.
- d. Nilai koefisien regresi variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3) bernilai 0,320 ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 1 maka akan terjadi peningkatan Kualitas Informasi laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,320, dengan asumsi variabel ini berniali konstan.

F. Pengujian Hipotesis

1. Uji Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh parsial setiap variabel independen terhadap Kualitas Informasi laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengujian ini dilakukan dengan melihat tingkat signifikan dari masing-masing variabel. Apabila signifikansi $<0,05$ maka hipotesis diterima dan apabila signifikansi $>0,05$ maka hipotesis ditolak. Hasil uji t terhadap variabel penelitian dapat dilihat pada tabel V.8.

Berdasarkan hasil analisis pada tabel V.8, maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen pada hasil dan pembahasan sebagai berikut :

a. Pengujian Hipotesis Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian data yang dapat dilihat pada tabel V.8 maka diperoleh hasil uji t yang diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independen. Untuk variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia (X_1) nilai signifikansinya adalah $0,003 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. Sehingga hipotesis pertama dari penelitian ini diterima.

b. Pengujian Hipotesis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian data yang dapat dilihat pada tabel V.8 maka diperoleh hasil uji t yang diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independen. Untuk variabel Sistem Pengendalian Intern (X_2) nilai signifikansinya adalah $0,006 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. Sehingga hipotesis kedua dari penelitian ini diterima.

c. Pengujian Hipotesis Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian data yang dapat dilihat pada tabel V.8 maka diperoleh hasil uji t yang diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independen. Untuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3) nilai signifikansinya adalah $0,010 < 0,05$. Hal ini menunjukkan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. Sehingga hipotesis ketiga dari penelitian ini diterima.

2. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel independen yaitu Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara bersama-sama (simultan) dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil uji F terhadap variabel penelitian dengan menggunakan program SPSS versi 23 adalah sebagai berikut:

Tabel V. 9

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	159,832	3	53,277	13,526	,000 ^b
Residual	232,390	59	3,939		
Total	392,222	62			

Dependent Variable: Y

Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber : Data Ouput SPSS, 2018

Dari tabel hasil uji ANOVA atau F-test didapat nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena tingkat probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a diterima. Artinya secara bersama-sama Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

G. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Informasi laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Bintan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas t hitung untuk variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia sebesar 3,069 dengan nilai signifikansinya adalah $0,003 < 0,05$ ini menunjukkan Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Informasi laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia yakni untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan-kemampuan sumber daya manusia, maka upaya pendidikan dan pelatihan adalah yang paling diperlukan. Upaya inilah yang dimaksudkan dengan pengembangan sumber

daya manusia. Mengingat faktor pendidikan sangat dibutuhkan dalam upaya membangun Kapasitas sumber daya manusia, maka pemerintah harus menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama agar dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia guna memperoleh pelaporan keuangan pemerintah yang berkualitas.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Bastian (2006) bahwa dengan adanya kompetensi staf akuntansi yang memadai memungkinkan terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Ini artinya untuk meningkatkan Kualitas Informasi laporan Keuangan Pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan tentu harus didukung oleh kapaitas sumber daya manusia yang berkualitas.

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu membuat laporan keuangan, karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dengan baik dan sesuai dengan bidangnya sehingga pelaporan keuangan bisa tepat waktu.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010). Penelitiannya menyatakan bahwa Sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mushlika Diawati (2015) menunjukkan bahwa hanya Kapasitas Sumber Daya Manusia yang berpengaruh signifikan positif terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Informasi laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Bintan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas t hitung untuk variabel Sistem Pengendalian Intern sebesar 2,858 dengan nilai signifikansinya adalah $0,006 < 0,05$ ini Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Informasi laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalin intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan dan kualitas laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan fondasi *good governance*

dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan LKPD sehingga dapat mewujudkan tujuan pemerintah yaitu menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

Dalam PP No 60 tahun 2008 sistem pengendalian intern adalah sistem pengendalian intren yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intren pemerintah merupakan suatu proses yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektifitas, efesiensi ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah yang terlihat dari kualitas informasi laporan keuangan. Saat ini LKPD kabupaten Bintan mendapat Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) Pada tahun 2015. Berdasarkan kenyataan tersebut WTP akan memberikan kebanggaan dan menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah institusi dalam mengelola anggarannya. Sehingga sistem pengendalian intern memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Indriasari dan Nahartyo (2010). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengendalian intern akuntansi mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Susanti (2010). Hasil penelitiannya menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan.

c. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Informasi laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Bintan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas t hitung untuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 2,652 dengan nilai signifikansinya adalah $0,010 < 0,05$ ini Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Informasi laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi telah perkembangan IT dan web, serta regulasi, mempunyai dampak yang signifikan pada operasi, sistem, dan kualitas informasi. Dinamika perubahan yang terjadi harus tetap dikontrol agar tidak mengakibatkan sebuah kerugian atau potensi kerugian daerah dan/ atau negara. Perkembangan IT dan web, serta regulasi juga mempunyai dampak yang signifikan pada operasi, sistem, dan kualitas informasi. Dengan adanya IT maka pekerjaan akan menjadi sangat mudah sehingga kemungkinan menyusun laporan keuangan yang berkualitas semakin besar. Dengan demikian, IT merupakan bagian terpenting dari penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi yang memiliki kualitas andal adalah apabila

informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Pesatnya kemajuan teknologi informasi serta potensi pemanfaatannya secara luas dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan membantu dalam penyajian pelaporan keuangan. Selain itu dapat menyimpan data dalam jumlah besar dan meminimalisir terjadinya kesalahan serta biaya pemrosesan lebih rendah. Dengan pemanfaatan teknologi yang baik diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tantriani Sukmaningrum (2012) menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan pemerintah Daerah.

H. Koefisien Determinasi

Tabel V.10
Model Summary^b

Model	R	Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,638 ^a	,408	,377	1,985	,408	13,526	3	59	,000

^aredictors: (Constant), X3, X2, X1

Dependent Variable: Y

Sumber : Data Output SPSS, 2018

Pada tabel *model summary* diatas dapat dijelaskan bahwa koefisien korelasi (R) sebesar 0,638 hubungannya antara variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah cukup erat. Korelasinya bersifat positif artinya jika nilai variabel independen naik maka direspon dengan kenaikan variabel dependen.

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,408 artinya bahwa 40,8% Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Sedangkan sisanya sebesar 59,2 % dapat dijelaskan oleh variabel atau faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model atau persamaan regresi ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara Parsial Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bintan.
2. Secara Parsial Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bintan.
3. Secara Parsial Pemanfaatan Teknologi berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bintan.
4. Secara Simultan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bintan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, penulis hendak memberikan beberapa saran untuk Kabupaten Bintan dan juga untuk penelitian yang akan datang agar penelitian ini selanjutnya lebih sempurna. Saran-saran yang penulis berikan antara lain:

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan agar pemerintah daerah Kabupaten Bintan memberikan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan dengan memperhatikan standar operasional dan regulasi yang berlaku supaya dapat meningkatkan kinerja pegawai pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
2. Untuk penelitian selanjutnya, dikarenakan adanya variabel lain yang mempengaruhi Kualitas Informasi laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka hendaknya peneliti selanjutnya menambahkan variabel lain.
3. Perlu dilakukan juga penelitian dengan sampel yang lebih banyak dan tidak terbatas pada Dinas, Kantor, atau Badan saja, tetapi diperluas lagi untuk seluruh Dinas di Pemerintah Kota dan Kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianti, Dita, 2011, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Batang), UNDIP, Semarang.
- Azhar, 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri No. 13 pada Pemerintah Kota Banda Aceh . Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Bastian, Indra, 2005, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Erlangga, Gajah Mada University Press Yogyakarta.
- BPK, 2012, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2012, Jakarta.
- Eisendhardt, Kathleen, 1989, Agency Theory, An Assessment and Review, Academy of Management Review vol.14 No. 1 pp 57-74
- Ghozali, Imam, 2005, Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hamzah, Ardi, 2009, Pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial, Kesesuaian Tugas dan Kondisi yang Memfasilitasi Pemakai Terhadap Minat Pemanfaatan Sistem Informasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten di Pulau Madura, Simposium Nasional Sistem Teknologi Informasi, UGM.
- Indriasari, Desi, dan Ertambang Nahartyo, 2008, Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Intern Sistem Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, SNA, VII, Pontianak.
- Jurnali, Teddy & Bambang Supomo, 2002, Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas Teknologi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Akuntan Publik, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia vol, 5 no,2,214-228.
- Mardiasmo, 2009, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Rasul, Sjahruddin, Dr, SH, 2003, Pengintegrasian Sistem Akuntansi Kinerja dan Anggaran Dalam Perspektif UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta.

- Sekaran, Uma, 2009, Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Selemba Empat, Jakarta.
- Sumarsono, Sonny, 2010, Manajemen Keuangan Pemerintah, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Tuasikal, A, 2007, Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, vol 08, no 01.
- Wahan Komputer, 2003, Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer, Andi Yogyakarta.
- Warisno, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval, & Bernard Wong-on-wing, 2000, Accounting Information System : Essential Concepts and Applications, Fourt Edition John Wiley and Sons. Inc.
- Windyaningrum, Celviana, 2010, Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keteladanan dan Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN, SNA XIII, Purwokerto.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.